

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asikin, Zainal, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan, Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1998, *Komentar Atas Kepailitan Baru untuk Indonesia 1998*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1995, *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, M, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Redjeki, Sri, 2008, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Hartono, Soematri, Siti, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Hasan, Ali, M, 2003, *Berbagai Transaksi dalam Islam Fiqih Muamalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jazairi, Al, Jabr, Bakar, Abu, 2004, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*, Pustaka Arafah, Edisi Revisi, Solo.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mohammad, Nazir, 2003, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Prasetya, Rudi, 1996, *Likuidasi Sukarela dalam Hukum Kepailitan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Prodojhamidjojo, Martiman, 1999, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Tentang Kepailitan*, CV.Mandar Maju, Jakarta.

Shubhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik DiPeradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sinaga, Syamsudin, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta

Sjahdeni, Remi, Sutan, 2002, *Hukum Kepailitan-Memahami Failssementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Tjitrosudibio dan Subekti, 1982, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-6, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Usman, Rachamadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedis Pustaka Utama, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Grafindo Persada, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, 2000, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan Pailit Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### C. Karya Ilmiah

Hartini,Rahayu, 2009, *Aspek Normatif Undang-Undang Kepailitan*, Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Muhammad,Nizar, 2017, *Studi Komparaasi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemegang Hak Preferen dalam proses Kepailitan di Indonesia*, Skripsi UINSBY, Surabaya.

Wijayanti,Riska, 2013, *Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan Perkara Kepailitan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin*, Tesis UNDIP, Semarang.

### D. Internet

<http://mhugm.wikidot.com>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 21.30 WIB.

<http://www.scribd.com/doc/51106383/32/G-Metode-Analisis-Data>, diakses pada tanggal 24 November 2018, pukul 22.10 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ltdad52d2429e9/jaksa-pengacara-negara-akan-dihilangkan>, diakses pada tanggal 18 Januari 2019 pukul 22:00 WIB